BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.¹

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa khususnya orangtua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.²

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, kewajiban selalu beriringan dengan hak. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan) keharusan, tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 11.

² *Ibid.*, hlm. 12.

“anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya..³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menyebutkan :

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Islam memandang kehidupan anak dimulai sejak dalam rahim. Saat itu kehidupan muncul dan saat itu pula melekat pada dirinya hak-hak yang harus dilindungi.⁵ Dalam perspektif hukum Islam pemeliharaan anak meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa.⁶

Pendidikan adalah kewajiban orangtua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat

³*Ibid.*, hlm. 21.

⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.

⁵ Mohamad AthoMudzhar dan Muhammad Maksu, *Fikih Responsif (Dinamika Hukum Ekonomi Dan Hukum Keluarga Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm, 296

⁶ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat (Buku Daros)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 134.

Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggungjawab orangtuanya. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46.⁷

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi:46).⁸

Nafkah anak itu diwajibkan atas bapak. Anak itu adalah bagian dari bapaknya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلَىٰ دَلَهُ رَزَقْنَاهُمْ وَلْيَسَّرْ لَهَا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”.⁹

Pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini sangat cepat, sehingga terdapat berbagai masalah yang cukup besar pula. Diantaranya masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu masalah sosial yang sering kita jumpai di kota-kota besar adalah masalah anak terlantar yang hidup di jalanan yang keberadaannya seharusnya dipelihara oleh Negara sebagaimana bunyi Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.¹⁰

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan

⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 294.

⁸ Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1999, hlm. 300.

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm. 624.

¹⁰ Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.2, Desember 2013, hlm. 146.

memunculkan gelandangan dan pengemis (gepeng). Sementara mereka juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara). Persoalan anak terlantar bukan semata tanggungjawab pemerintah tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun dilihat dari sisi keberadaan penguasa atau pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggungjawab pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak terlantar.¹¹

Idealnya anak terpenuhi semua kebutuhannya sesuai dengan hak-haknya. Disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orangtua dan keluarga. Sehingga banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang dijalanan. Anak terlantar yang hidup di jalanan tidak hidup dengan layak karena dalam kehidupannya di jalanan tidak mempunyai kesempatan mendapat pendidikan di sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya. Daerah-daerah

¹¹ Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Anak*, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2013, hlm. 118 – 120.

favorit yang biasa menjadi tempat adu untung salah satunya adalah *traffic light*.¹²

Islam tidak membenarkan jika seseorang mengandalkan pemberian, padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri, mencukupi keluarga dan tanggungannya. Termasuk hal yang ditentang dan diharamkan Nabi SAW, bagi orang Islam adalah meminta-minta. Dengan tindakan seperti itu berarti ia telah mengotori “air muka”nya sendiri, mencoreng nama baik, harga diri, dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal tidak ada alasan yang memaksanya untuk meminta-minta. Nabi SAW bersabda:

الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْجَمْرَ

Artinya : “Orang yang meminta-minta bukan karena kebutuhan yang mendesak, seperti orang yang memungut bara api”.¹³

Subjek mengatakan mereka tidak mengetahui bahwa ada konvensi anak yang didalamnya berisi tentang hak-hak anak, seperti : hak kelangsungan hidup (*survival right*), hak berkembang (*development right*), hak memperoleh perlindungan (*protection right*), serta hak-hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kepentingan hidupnya. Subjek hanya menjalankan peran sebagai orangtua pada umumnya yaitu memberi makan dan memberikan anak-anak mereka rumah untuk berteduh. Selebihnya mereka tidak mengerti tentang isi dari konvensi hak-hak anak tersebut. Hal ini tentunya dengan mengorbankan hak-hak anak. Bagi orangtua anak memiliki nilai ekonomis tertentu. Sistem kesejahteraan sosial yang belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Kemiskinan dan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan dibarengi lemahnya

¹² Ninik Yuniarti, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis*, Komunitas 4, Universitas Negeri Semarang, Juli, 2012, hlm. 211.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, 2005, hlm. 181.

perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.¹⁴

Islam sebagai agama yang universal sangatlah menghendaki anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakekat anak itu sebagai rahmat yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak hidup terlantar. Keberpihakan Islam ini bukan sebatas pada aktivitas yang memecahkan berbagai masalah sosial termasuk anak terlantar yang di jalanan, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.¹⁵

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial¹⁶

Hukum kesejahteraan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Undang-Undang kesejahteraan anak diperlukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

¹⁴ Megalia Tifani Piri, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*, Lex Administratum, Vol.I,No.2, Apr-Jun, 2013, hlm. 29.

¹⁵ Sugianto, *Op. Cit.*, hlm. 146-153.

¹⁶ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- c. Bahwa didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi.
- d. Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri.
- e. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Jelas dalam pasal tersebut mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diharapkan dalam upaya perlindungan anak. Dengan demikian dituntut adanya suatu rasa tanggungjawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut.¹⁷

Pembinaan anak terlantar merupakan salah satu aspek dari usaha perlindungan terhadap anak. Hal ini merupakan suatu perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Karena itu kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Pembinaan anak terlantar merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana untuk melepaskan anak itu dari persoalan hidup yang dihadapinya. Tidak semua orangtua dapat mewujudkan kesejahteraan bagianak-anaknya, karena adanya berbagai hambatan.¹⁸

Koordinasi dan kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak yang pada hakikatnya menghambat kegiatan perlindungan anak secara

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao, *et.al*, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 11.

¹⁸ Basri, *Tanggungjawab Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembinaan Anak Terlantar*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, KanunNo. 42, Agustus, 2005, hlm. 350.

keseluruhan. Koordinasi kerjasama ini sebaiknya membantu mengatur bidang minat pelayanan dalam pelaksanaan perlindungan anak yang mempunyai berbagai macam bidang pelayanan.¹⁹

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus selaku instansi terkait dalam menangani masalah sosial, sudah melakukan upaya dalam usaha kesejahteraan anak salah satunya melakukan kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar. Pemerintah juga memberi bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan pemberian modal. Selain melakukan pelatihan dan memberi bantuan sosial pemerintah juga melakukan razia terhadap anak-anak terlantar yang mengemis dan mengamen. Dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak pemerintah Kabupaten Kudus juga berkoordinasi dengan panti-panti swasta untuk upaya kesejahteraan anak.²⁰

Pemerintah sudah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak, tetapi pola pikir dan faktor lingkungan terkadang program-program pemerintah tidak berjalan sesuai harapan. Anak-anak masih tidak terpenuhi kesejahtraannya karena kurangnya tanggungjawab orangtua terhadap anak. Fenomena permasalahan anak akan semakin rumit jika dibiarkan saja. Mereka juga mempunyai hak-hak yang sama seperti anak lainnya. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menanggulangnya. Keberadaan penguasa atau pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggungjawab pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan masalah anak.²¹

Berkenaan masalah diatas, penelitimerasa tertarik meneliti masalah ini secara mendalam dan akan mengungkapkannya dalam sebuah karya

¹⁹ Arif Gosita, *Op., Cit.*, hlm. 23.

²⁰ Hasil Dokumentasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus tahun 2017-2018.

²¹ Hasil Observasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus pada tanggal 20 September 2018.

ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak** (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus).

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pada judul ini, maka peneliti memberikan penegasan istilah pada judul ini. Adapun penegasan-penegasan pada judul ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hak tersebut tercermin dalam kalimat : “.....Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu....”²²

2. Anak Terlantar

Anak terlantar pada hakikatnya sama dengan anak-anak lainnya, mereka juga memiliki hak yang sama dalam pemenuhan hidupnya. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²³

²² Walayudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1 .

²³ Imam Sukardi, *Op. Cit.*, hlm. 127.

3. Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 menyatakan, Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani maupun sosial.²⁴

Asuhan anak pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orangtua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan anak itu sendiri perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orangtua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum disertai hak dan kewajiban itu. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab negara.²⁵

C. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Sesuai dengan judul yang peneliti telah ambil dalam penelitian ini, maka peneliti ini hanya berfokus pada tanggungjawab pemerintah terhadap anak terlantar di bidang perlindungan anak serta kendala dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak terlantar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dan di Desa Demaan.

D. Rumusan Masalah

Guna mengatur agar pembahasan tidak keluar dari konteks pembahasan, maka perlu diberikan batasan-batasan untuk memberi arah

²⁴Mohammad Taufik Makarao, *et.al*, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²⁵*Ibid.*, hlm. 12.

yang jelas dalam titik pembahasan penelitian ini. Karenanya peneliti kemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar di Kabupaten Kudus?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar di Kabupaten Kudus ?
3. Apa kendala dan upaya pemerintah dalam mensejahterakan anak terlantar di Kabupaten Kudus ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, maka setiap penelitian pasti mempunyai tujuan. Tanpa suatu tujuan yang jelas, penelitian tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tanggungjawab pemerintah terhadap kesejahteraan anak terlantar di bidang perlindungan anak di kabupaten Kudus.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab anak terlantar.
3. Untuk menjelaskan kendala dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan anak terlantar di kabupaten Kudus.

F. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu Hukum Islam secara umum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak untuk upaya pemenuhan kesejahteraan anak, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang operasionalisasi pemerintah di bidang perlindungan anak.

c. Bagi Lembaga Pemerintahan yang terkait

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan lembaga pemerintah yang terkait dengan permasalahan anak terlantar, supaya program-program pemerintah berjalan efektif untuk kelangsungan hidup anak terlantar agar mendapat kesejahteraan.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pemahaman masyarakat di dalam melakukan kegiatan sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini dimaksud sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori, perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Pada bab ini memuat deskripsi pustaka, yaitu : perlindungan hukum terhadap anak, hak anak, kewajiban orangtua terhadap anak, anak terlantar, serta kendala dan upaya yang dihadapi pemerintah dalam usaha kesejahteraan anak.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data serta analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dari pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar serta kendala dan upaya pemerintah dalam mensejahterakan anak terlantar di kabupaten Kudus.

5. BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup, dan pada bagian akhir skripsi ini, dilampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi dan daftar riwayat hidup.